BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Skripsi ini berupaya mengungkap hegemoni diskursif Cina di kawasan Asia Tenggara. Hegemoni adalah bagaimana elemen partikular mampu menciptakan dan membangun tuntutan mereka menjadi universal. Studi ini akan berfokus pada bagaimana upaya Cina menggunakan penanda kosong sebagai kekuatan hegemoninya. Konsep penanda kosong tersebut beroperasi melalui proyek *Belt and Road Initiative*. Eksplorasi penelitian ini menggunakan teori hegemoni diskursus yang dicetuskan oleh Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe. Teori ini mengacu pada pemikiran postmarxisme yang menjelaskan bahwa kekuatan politik dibangun melalui proses negosiasi dan artikulasi, sehingga melibatkan pembentukan identitas yang kolektif.

Diskursus mengartikan bahwa semua objek dan tindakan memiliki makna, dan maknanya merupakan produk dari sistem-sistem partikular yang memiliki perbedaan-perbedaan signifikan, yang bersifat spesifik secara historis. Konsep ini menelaah bagaimana praktik-praktik sosial mengartikulasikan dan mengkontestasikan diskursus-diskursus yang membentuk realitas sosial. Praktik-praktik ini menjadi mungkin karena sistem-sistem pemaknaan bersifat *contingent* dan tidak pernah secara tetap (*fixed*) menuntaskan wilayah yang sosial dari pemaknaan (Hutagalung 2008).

Menurut Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe, diskursus merupakan hasil dari perluasan dimensi hegemoni Gramsci yang menekankan bahwa hegemoni berhasil ketika kelas penguasa berhasil menyingkirkan kekuatan oposisi, dan memenangkan persetujuan baik secara aktif maupun pasif dari para sekutunya. Laclau dan Mouffe memodifikasi hegemoni dalam bentuk identitas yang kemudian didisiplinkan oleh diskursif. Fokus utama pembentukan hegemoni adalah pada cara struktur kekuasaan terbentuk dan dipertahankan melalui proses diskursif (Laclau and Mouffe 1985).

Terdapat berbagai kanal tempat diskursus dibangun, seperti kanal kekerasan, kanal ekonomi, dan kanal budaya. Kanal-kanal ini perlu dipetakan untuk memahami bagaimana diskursus tersebut diselenggarakan. Namun, kanal-kanal ini tidak selalu berfungsi seperti konsep *panopticon* dalam pemikiran Michel Foucault. *Panopticon* merupakan konsep yang mencerminkan model relasi dalam penjara, di mana pengawasan berlangsung melalui menara pengawas di tengah ruang tahanan. Menara ini dilengkapi dengan kaca satu arah sehingga tahanan tidak mengetahui kapan mereka diawasi. Ketidaktahuan ini membuat para tahanan menginternalisasi perasaan diawasi, sehingga mereka berperilaku sesuai aturan. Konsep ini bersifat top-down, yakni adanya menara pusat yang mengendalikan semua gerak-gerik penghuni.

Dalam konteks kekuasaan kontemporer, terutama dalam pemikiran postmarxisme, kekuasaan bersifat lebih cair. Oleh karena itu, kontribusi Foucault menjadi penting. Ia menunjukkan bahwa tidak semua kekuasaan bekerja secara *top-down* seperti dalam model *panopticon*; ada pula kekuasaan yang bersifat *bottom-*

up, yakni kekuasaan sebagai mekanisme di mana masyarakat menunjukkan daya tawar politiknya. Dalam hal ini, Laclau dan Mouffe mengadopsi konsep kekuasaan yang tidak sepenuhnya hierarkis, melainkan dapat dibangun dari bawah ke atas.

Dalam konteks formasi diskursif, perhatian tidak hanya diberikan pada bagaimana diskursus dibangun oleh para elit, negara, atau lembaga-lembaga besar, tetapi juga pada bagaimana komunitas dan masyarakat lokal meresponsnya. Dinamika antara kedua aspek tersebut menunjukkan bagaimana penanda kosong diisi, baik oleh pemerintah Cina maupun oleh Asia Tenggara. Dari sinilah akan terlihat bahwa proses pembentukan hegemoni diskursus tidak bersifat tunggal, melainkan terfragmentasi dan memiliki berbagai versi yang berbeda, tergantung pada resistensi lokal dan dinamika sosial yang ada.

Penanda kosong mengungkap ironi mendasar yang tersembunyi di balik representasi simbolik. Ia bekerja dengan mensintesis fragmentasi sosial melalui mekanisme pengaburan yang canggih. Penanda kosong bukan hanya sebuah instrumen hegemoni, namun sebuah arkeologi kekuasaan yang mencuri partikularitas dan menciptakan totalitas di mana perbedaan ditundukkan pada konsep kesatuan yang dirancang (Laclau 2005, 80-100). Penanda kosong berfungsi sebagai mesin penghasil konsensus yang mampu mengubah kesenjangan menjadi sebuah narasi yang koheren, mengubah konflik sosial menjadi panggung teater politik yang mengaburkan hubungan kekuasaan yang sebenarnya, serta membangun ilusi persatuan di atas puing-puing perbedaan yang telah dikompromikan.

Konsep penanda kosong (*empty signifier*) dari Laclau dan Mouffe menjadi pintu masuk untuk membaca ulang ekspansi diskursif Cina di Asia Tenggara. Dalam konteks penelitian, Cina dipercaya sebagai negara yang mampu membawa Asia Tenggara menuju pembangunan global. Upaya tersebut didukung melalui kebijakan *Belt and Road Initiative* yang berhasil menyusupi kawasan. Asia Tenggara menjadi strategis karena terjadi pertarungan diskursus dengan kekuatan-kekuatan hegemon besar dunia, seperti Amerika Serikat, Jepang, dan India.

Dalam beberapa dekade terakhir, Cina telah bertransformasi dari negara berkembang menjadi kekuatan global dengan pengaruh ekonomi dan geopolitik yang semakin meluas. Salah satu instrumen utama dalam ekspansi pengaruh ini adalah kebijakan *Belt and Road Initiative* (BRI), yang diluncurkan pada tahun 2013 oleh Presiden Xi Jinping. Proyek ini menampilkan dirinya sebagai narasi besar tentang konektivitas, pembangunan bersama, dan masa depan kolektif. Namun, di balik narasi-narasi seperti *win-win cooperation* dan *community of shared future*, tersembunyi struktur diskursif yang bekerja melalui apa yang disebut sebagai penanda kosong.

Di balik proyek-proyek infrastruktur yang menjulang, di balik istilah "*win-win cooperation*" yang berulangkali dikumandangkan, tersembunyi satu pertanyaan mendasar: narasi siapa yang sedang kita hidupi? Di itik inilah, studi mengenai hegemoni tidak cukup jika hanya dimaknai secara material melalui kekuatan militer, arus perdagangan, atau kepentingan investasi. Ada medan yang jauh lebih sunyi, namun tidak kalah menentukan, ia adalah wacana.

Sebagai tokoh penting dalam kebangkitan tokoh modern, Xi Jinping berperan sebagai alat untuk menyampaikan rencana hegemoni baru. Namun, kehadiran Xi tidak selalu berbicara melalui suara. Ia juga hadir sebagai diam yang bermakna, sebagai ruang kosong yang dapat diisi oleh apa pun. Ketika XI berbicara tentang "taksiran sejarah", "komunitas senasib sepenanggulangan", atau "jalan pembangunan sosialisme dengan karakteristik Cina", yang mengemuka bukan kejelasan, melainkan kelenturan makna. Justru dalam ketidakjelasan inilah kekuatan diskursif itu mengendap dan menyebar.

Asia Tenggara adalah arena penting bagi artikulasi wacana ini. Dengan posisi strategis dalam rantai suplai global, kawasan ini menjadi tempat di mana hegemoni tidak dipaksakan secara kasar, melainkan dinegosiasikan melalui bahasa, simbol, dan makna. Ketika pemimpin negara-negara Asia Tenggara mengutip pidato Xi dalam forum internasional, atau ketika media regional memproduksi citra "Cina ramah" dalam narasi pembangunan, kita sedang menyaksikan bagaimana penanda kosong bekerja dengan tidak melalui tekanan, tetapi melalui penetrasi diskursif yang subtil.

Pada masa pandemi Covid 2019 telah menimbulkan tantangan yang signifikan terhadap proyek-proyek BRI di seluruh dunia. Sekitar 20 persen proyek BRI terkena "dampak serius" pada juni 2020, dan 30-40 persen terkena dampak "agak parah". Asia tenggara telah menjadi salah satu tujuan utama investasi BRI pada tahun 2020, meskipun terjadi penurunan tajam dalam keseluruhan investasi BRI Cina di dunia. Pada akhir tahun 2021, investasi Cina di 57 negara telah mencapai US$20,3 miliar dengan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 14,1 %.

Diantara sepuluh negara penerima manfaat terbesar 7 diantaranya berasal dari Asia Tenggara, yaitu Singapura, Indonesia, Malaysia, Vietnam, Laos, Thailand, dan Kamboja (Zheng 2022).

Berdasarkan laporan portal sabuk dan jalan, sebanyak 833 proyek yang melibatkan Cina di dunia antara Januari 2021 hingga Maret 2022, di mana sekitar 29 persen dilaksanakan di negara-negara Asia Tenggara. Studi ini mencatat 95 proyek BRI yang diinvestasikan Cina di Asia Tenggara. Karena berada dalam tahap pengembangan yang berbeda, proyek-proyek ini termasuk 87 proyek induk. Angka tersebut menandakan komitmen Cina terhadap proyek BRI di Kawasan, bahkan di masa pandemi (lihat gambar 1).

Gambar 1.1 Distribusi proyek BRI di Asia Tenggara

Status	Cambodia	Indonesia	Laos	Malaysia	Myanmar	Philippines	Thailand	Vietnam
Bid Awarded	1	13	1	1		1	1	
Completed	6	7	5	2	1	1		2
Construction Started	2	5	1	1	1	2	1	
Contract Signed	4	9	1		1	1	2	
In progress	4	6	4	3	1	2	1	1

Sumber: ISEAS 2023

Gambar di atas menggambarkan variasi tingkat negara dalam distribusi proyek BRI di Asia Tenggara mulai bulan januari 2021. Di antara negara-negara Asia Tenggara, Indonesia telah menyelenggarakan 40 proyek dan menempati peringkat teratas dalam daftar. Proyek-proyek ini mencakup berbagai sektor, termasuk energi, transportasi, konstruksi, kimia, logam, dan lain-lain (Zheng 2022). Data tersebut menunjukkan bahwa Cina adalah aktor penting dalam pembangunan di Asia Tenggara.

BRI beroperasi secara masif di Asia Tenggara, wilayah yang secara geografis, ekonomi, dan geopolitik memiliki nilai strategis bagi Cina. Melalui proyek infrastruktur seperti pelabuhan, rel kereta cepat, dan jalur logistik, Cina membentuk struktur material yang menentukan arah suprastruktur politik dan ekonomi di kawasan tersebut. Infrastruktur tidak berdiri sebagai entitas teknis belaka, melainkan menjadi alat penentu dalam pembentukan relasi kuasa regional. Dalam konteks ini, BRI tidak dapat dipahami semata-mata sebagai proyek ekonomi, melainkan sebagai instrumen hegemonik yang membentuk bagaimana negara-negara Asia Tenggara memahami kemajuan, modernitas, dan kerjasama internasional.

Di tengah ekspansi pengaruh Cina melalui BRI, muncul tantangan besar berupa perang dagang dengan Amerika Serikat. Persaingan ini bukan hanya tentang tarif dan ekspor, tetapi tentang perebutan posisi dalam sistem dunia dan monopoli atas narasi pembangunan global. Amerika Serikat memposisikan dirinya sebagai pelindung liberalisme dan pasar bebas, sementara Cina mencoba menawarkan alternatif model pembangunan yang disebut *peaceful development*. Ketegangan ini

menciptakan dinamika baru di Asia Tenggara, di mana negara-negara dihadapkan pada tekanan diplomatik dan ekonomi dari kedua kekuatan, sekaligus mencoba memaksimalkan keuntungan dari masing-masing blok.

Namun, di balik narasi kerja sama, terdapat operasi diskursif yang berusaha memaksakan makna tertentu tentang Cina dan perannya di Asia Tenggara. Diskursus Cina tentang kerja sama dan pembangunan seringkali bertabrakan dengan pengalaman nyata negara-negara Asia Tenggara, seperti ketimpangan perdagangan, ketegangan di Laut Cina Selatan, hingga pengaruh budaya yang dianggap mendominasi. Asia Tenggara, dalam hal ini, menjadi “laboratorium” diskursif, tempat di mana makna tentang kekuasaan, kedaulatan, dan kerja sama terus dinegosiasikan.

Dalam situasi ini, Cina terus berupaya untuk menciptakan posisi hegemonik. Proses ini tidak selalu terjadi melalui dominasi langsung, tetapi melalui penguasaan terhadap “penanda kosong” atau *zero signifier* seperti "pembangunan damai," "keamanan," atau "kesejahteraan." Cina berupaya menjadi pusat makna dari konsep-konsep ini, sehingga semua alternatif narasi menjadi terpinggirkan atau dianggap antagonistik. Penanda kosong menjadi instrumen kunci dalam mendekonstruksi resistensi negara-negara Asia Tenggara. Konsep ini menciptakan ilusi kesetaraan di mana kesetaraan struktural direpresentasikan sebagai kesempatan bersama. Hutang infrastruktur tidak lagi dipahami sebagai mekanisme kontrol, melainkan didiskursuskan sebagai investasi masa depan bersama.

Negara-negara seperti Filipina, Vietnam, Malaysia dan bahkan Indonesia, meski menunjukkan resistensi terhadap klaim teritorial Cina di Laut Cina Selatan

(LCS), tetap terikat dalam hubungan ekonomi dan budaya yang semakin erat. Penelitian ini mencoba untuk menggali bagaimana diskursus ini tidak hanya dipaksakan dari luar, tetapi diterima secara aktif oleh subjek-subjek di Asia Tenggara yang, dalam konteks tertentu, merasakan bahwa persetujuan aktif terhadap diskursus Cina adalah cara terbaik untuk bertahan dalam ketegangan global yang semakin intens. Sebuah penelitian yang menggabungkan teori hegemoni ala Gramsci dengan konsep diskursus menurut Foucault ini, menawarkan cara baru untuk memahami bagaimana resitensi dari Asia Tenggara tidak menimbulkan konflik yang besar.

Asia Tenggara juga strategis karena dinamika diskursusnya yang kompleks, di mana negara-negara di kawasan ini tidak hanya berinteraksi dengan Cina, tetapi juga dengan kekuatan besar lain yaitu Amerika Serikat. Kedua kekuatan besar ini bersaing dalam memberikan makna terhadap konsep-konsep kunci seperti "kemitraan", "pembangunan", dan "keamanan regional". Amerika Serikat menekankan pentingnya transparansi, tata kelola yang baik, dan standar internasional dalam proyek-proyek pembangunan, sementara Cina mengedepankan prinsip non-interferensi dan hasil konkret yang cepat terlihat. Dalam konteks keamanan, Amerika mengangkat isu-isu seperti kebebasan navigasi dan penghormatan terhadap hukum internasional, sementara Cina mempromosikan konsep "keamanan bersama" yang menekankan dialog dan konsensus regional. Pertarungan wacana ini semakin intensif seiring meningkatnya ketegangan geopolitik, dengan kedua pihak berusaha membangun aliansi diskursif dengan berbagai aktor regional, dari pemerintah hingga masyarakat sipil dan media.

Hasilnya adalah sebuah medan wacana yang dinamis di mana makna-makna terus dinegosiasikan dan diperebutkan, mencerminkan kompleksitas hubungan kekuasaan di Asia Tenggara kontemporer.

Situasi ini menunjukkan bahwa Asia Tenggara bukan sekadar "pasar pasif" bagi hegemoni Cina, melainkan ruang diskursif di mana Cina harus terus bernegosiasi untuk mempertahankan posisinya. Dengan memahami Asia Tenggara sebagai ruang strategis dalam ranah diskursus, bukan hanya sebagai wilayah geografis, kita dapat melihat bagaimana hegemoni Cina dibangun melalui artikulasi makna dan pelembagaan narasi. Perspektif kritis ini memberikan wawasan baru tentang bagaimana dominasi global beroperasi di era multipolaritas.

Pendekatan Laclau dan Mouffe terhadap hegemoni dan diskursus memungkinkan analisis yang lebih mendalam mengenai bagaimana Cina membangun hegemoni melalui narasi-narasi yang melampaui batasan ekonomi. Dengan mengadopsi pendekatan diskursif ini, skripsi ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana Cina menggunakan penanda kosong seperti “kerjasama,” “stabilitas,” dan “pembangunan bersama” sebagai alat hegemoni yang mampu menyatukan banyak kepentingan dan tuntutan yang berbeda di Asia Tenggara.

Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menambah satu simpulan baru tentang kebangkitan Cina, melainkan untuk membongkar cara kerja kekuasaan yang tidak terlihat. Dengan menggunakan pendekatan teori diskursus dan konsep penanda kosong, riset ini akan menelaah bagaimana sosok Xi difungsikan sebagai pusat dari formasi diskursif yang memungkinkan Cina mengokohkan hegemoninya

bukan melalui dominasi langsung, tetapi melalui kehadiran yang fleksibel, adaptif dan sukar ditolak.

Dengan kata lain, penelitian ini berangkat dari kegelisahan atas cara hubungan internasional kerap kali mengabaikan dimensi wacana dalam dinamika kekuasaan global. Hegemoni bukan hanya persoalan pertumbuhan GDP, tetapi juga tentang siapa yang berhak mendefenisikan dunia, dan dengan bahasa siapa dunia itu dimaknai. Xi Jinping, melalui proyek diskursifnya (BRI), sedang mencoba menjawab pertanyaan itu dan Asia Tenggara menjadi laboratorium hegemoniknya.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dirumuskan pertanyaan penelitian:

1. Bagaimana Xi Jinping menjadi penanda kosong dalam hegemoni diskursif Cina di Asia Tenggara?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana penanda kosong bekerja sebagai kekuatan hegemoni diskursif Cina di Asia Tenggara.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan pertanyaan dan tujuan penelitian yang telah diuraikan penulis, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung

maupun tidak langsung. Peneliti berharap penelitian ini dapat berkontribusi secara akademis maupun praktis.

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan kajian hubungan internasional yang kritis dalam bidang hegemoni diskursus Cina di kawasan Asia Tenggara.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan rujukan bagi para praktisi politik dalam menganalisa berbagai kebijakan Cina terhadap kawasan Asia Tenggara. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan menjadi studi pembanding dengan dominasi hegemoni Barat (liberal).

1.5 Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri atas 6 bab yang dalam setiap Bab terdapat beberapa sub-bab yang disesuaikan dengan bahasan penelitian. Bab 1 berisi latar belakang, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Bab 2 berisi tinjauan pustaka, kerangka teoritik, kerangka pemikiran dan hipotesis/argumen utama. Bab 3 menelusuri Genealogi Diskursus *Belt and Road Initiative*. Bab 4 merupakan bagian pembahasan terkait Penanda Kosong: Di balik Diskursus Payung Harmonis. Skripsi ini akan diakhiri dengan Bab 5 yang merupakan bagian penutup berisi kesimpulan dan rekomendasi yang diinferensikan berdasarkan hasil akhir penelitian.